

KAJIAN PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN KELUARGA PETANI

Amiruddin Ketaren ¹⁾, Rakhmadsyah Putra Rangkyu ²⁾

¹⁾Program Studi Sosiologi Universitas Malikussaleh – Indonesia, ketarenamiruddin@gmail.com

²⁾Program Studi Sosiologi Universitas Malikussaleh – Indonesia, oecoex@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia is an agricultural country. The reality is that the agriculture sector is often secondary or not a top priority. Government policies are more likely to support the industrial sector, while the younger generation tends to leave the agricultural sector. That has an impact on decreasing the level of community food security. Rice imports are still being carried out today. Various factors encourage the problem of food insecurity in Indonesia. This literature review intended to map some problems in agriculture. Various reference sources from books and scientific works were collected and analyzed. Certain aspects, particularly those related to the economy and socio-culture, are dissected and elaborated to produce a comprehensive input for policy breakthroughs in development in the agricultural sector. The estuary is an increase in food security that means an increase in welfare.

Keywords: Rural Development, Food Security, Farming Families

ABSTRAK

Indonesia adalah negara agraris. Realitasnya sektor pertanian acapkali dinomorduakan atau tidak menjadi prioritas utama. Kebijakan pemerintah lebih cenderung mendukung sektor perindustrian, sementara generasi muda mulai meninggalkan sektor pertanian. Hal itu berdampak pada menurunnya tingkat ketahanan pangan masyarakat. Impor beras masih dilakukan hingga saat ini. Berbagai faktor mendorong terjadinya masalah kerawanan pangan di Indonesia. Kajian literatur ini dimaksudkan untuk memetakan permasalahan di bidang pertanian secara umum. Berbagai sumber rujukan dari buku dan karya ilmiah dikumpulkan dan dianalisis. Aspek-aspek tertentu, khususnya yang terkait dengan ekonomi dan sosio-kultural dibedah dan dielaborasi guna menghasilkan suatu masukan terobosan kebijakan yang komprehensif dalam pembangunan di bidang pertanian. Muaranya adalah peningkatan ketahanan pangan yang berarti peningkatan kesejahteraan.

Kata Kunci: Pembangunan Pedesaan, Ketahanan Pangan, Keluarga Petani

PENDAHULUAN

Pembangunan pedesaan telah mendapat perhatian dan porsi yang semakin nyata karena sebagai tempat sebagian besar masyarakat berada. Pembangunan yang bertujuan untuk pertumbuhan sektor pertanian, integrasi nasional, dan keadilan ekonomi telah mengalami banyak perubahan. Pada dekade terakhir pembangunan yang lebih bersifat “pemberian” daripada pembangkitan kemampuan telah semakin berkurang. Sejalan dengan perubahan paradigma pembangunan, maka tujuan ini bergeser menjadi upaya menghilangkan atau mengurangi hambatan dalam kehidupan sosial dan ekonomi seperti pendidikan dan keterampilan serta pengembangan kesempatan kerja dan “penghilangan” faktor kemiskinan. Salah satu aspek yang akan dilihat adalah berkenaan dengan ketahanan pangan warga pedesaan, khususnya petani itu sendiri.

Pembangunan ketahanan pangan pada hakekatnya adalah memberdayakan masyarakat. Dalam hal ini adalah meningkatkan kemandirian dan kapasitas masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan dari waktu ke waktu. Masyarakat yang terlibat dalam pembangunan ketahanan pangan meliputi produsen, pengusaha, konsumen, aparatur pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat. Mengingat luasnya substansi dan banyaknya pelaku yang terlibat dalam pengembangan sistem ketahanan pangan, maka kerjasama yang sinergis dan terarah antar institusi dan komponen masyarakat sangat diperlukan. Pemantapan ketahanan pangan hanya dapat diwujudkan melalui suatu kerjasama yang kolektif dari seluruh pihak yang terkait (*stakeholders*), khususnya masyarakat produsen (petani), pengolah, pemasar, konsumen pangan, dan pemerintah. Proses pemberdayaan tersebut tidak lagi menganut pola serapan, tetapi didesentralisasikan sesuai potensi dan keragaman sumberdaya wilayah. Demikian pula kesempatan berusaha tidak harus selalu pada usaha tani padi (karena dengan luas lahan sempit tidak mungkin dapat meningkatkan kesejahteraannya), tetapi juga pada usaha tani non padi perlu dikembangkan. Dalam kaitannya dengan itu, upaya peningkatan ketahanan pangan tidak perlu terfokus pada pengembangan pertanian (dalam arti primer), tetapi diarahkan pada sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkelanjutan, berkerakyatan, dan terdesentralisasi.

Pemberdayaan masyarakat tersebut diupayakan melalui peningkatan kapasitas SDM dan kepemilikan tanah yang cukup agar dapat bersaing memasuki pasar tenaga kerja dan kesempatan berusaha yang dapat menciptakan dan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga kemampuan untuk mengakses (termasuk membeli) pangan dan tidak terjadinya ketergantungan pangan pada pihak manapun. Dalam hal inilah, petani memiliki kedudukan strategis dalam ketahanan pangan: petani

adalah produsen pangan dan petani adalah juga sekaligus kelompok konsumen terbesar yang sebagian masih miskin dan membutuhkan daya beli yang cukup untuk membeli pangan. Petani harus memiliki kemampuan untuk memproduksi pangan sekaligus juga harus memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri. Disinilah perlu sekali peranan pemerintah dalam melakukan pemberdayaan petani.

Dengan adanya peningkatan pendapatan, maka daya beli rumah tangga mengakses bahan pangan akan meningkat. Kemampuan membeli tersebut akan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk memilih (*freedom to choose*) pangan yang beragam untuk memenuhi kecukupan gizinya. Karena itu upaya pemantapan ketahanan pangan tidak dilakukan dengan menyediakan pangan murah, tetapi dengan meningkatkan daya beli. Dalam konteks inilah maka membangun kemandirian pangan pada tingkat rumah tangga ditempuh dengan membangun kemampuan (daya beli) rumah tangga tersebut untuk memperoleh pangan (dari produksi sendiri ataupun dari pasar) yang cukup, bergizi, aman dan halal, untuk menjalani kehidupan yang sehat dan produktif. Dengan demikian menghasilkan sendiri kemampuan memperoleh peningkatan pendapatan (daya beli) secara berkelanjutan. Dalam kaitan ini, maka kebebasan mengatur perdagangan pangan di daerah tidak perlu dibatasi, tetapi didorong dan diarahkan agar memberi manfaat yang optimal bagi konsumen dan produsen pangan di daerah yang bersangkutan sehingga kemandirian pangan akan dapat diwujudkan.

Ketahanan Pangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 mengatakan bahwa ketahanan pangan diwujudkan bersama oleh masyarakat dan pemerintah dan dikembangkan mulai tingkat rumah tangga. Apabila setiap rumah tangga Indonesia sudah mencapai tahapan ketahanan pangan, maka secara otomatis ketahanan pangan masyarakat, daerah, dan nasional akan tercapai. Dengan demikian, arah pengembangan ketahanan pangan berawal dari rumah tangga, masyarakat, daerah, dan kemandirian nasional bukan mengikuti proses sebaliknya. Karena fokusnya pada rumah tangga, maka yang menjadi kegiatan prioritas dalam pembangunan ketahanan pangan adalah pemberdayaan masyarakat agar mampu menolong dirinya sendiri dalam mewujudkan ketahanan pangan yang diukur melalui (a) kecukupan dan ketersediaan, (b) stabilitas ketersediaan, dan (c) aksesibilitas. Pengukuran ini didasarkan atas dasar kemampuan rumah tangga untuk dapat mengakses kebutuhannya, terutama beras. Berdasarkan konsep tersebut, maka terdapat beberapa prinsip yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung terhadap ketahanan pangan (*food security*) yang harus diperhatikan (Badan Ketahanan Pangan, 2005):

1. Rumah tangga sebagai unit perhatian terpenting pemenuhan kebutuhan pangan nasional maupun komunitas dan individu.
2. Kewajiban negara untuk menjamin hak atas pangan setiap warganya yang terhimpun dalam satuan masyarakat terkecil untuk mendapatkan pangan bagi keberlangsungan hidup.
3. Ketersediaan pangan mencakup aspek kecukupan jumlah pangan (*food sufficiency*) dan terjamin mutunya (*food quality*).
4. Produksi pangan yang sangat menentukan jumlah pangan sebagai kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan atau mengubah bentuk pangan.
5. Mutu pangan yang nilainya ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman.
6. Keamanan pangan (*food safety*) adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan keadaan manusia.
7. Kemerataan pangan merupakan dimensi penting keadilan pangan bagi masyarakat yang ukurannya sangat ditentukan oleh derajat kemampuan negara dalam menjamin hak pangan warga negara melalui sistem distribusi produksi pangan yang dikembangkannya. Prinsip pemerataan pangan mengamankan sistem pangan nasional harus mampu menjamin hak pangan bagi setiap rumah tangga tanpa terkecuali.
8. Keterjangkauan pangan mempresentasikan kesamaan derajat keleluasaan akses dan kontrol yang dimiliki oleh setiap rumah tangga dalam memenuhi hak pangan mereka. Prinsip ini merupakan salah satu dimensi keadilan pangan yang penting untuk diperhatikan.

Namun disisi lain, ketahanan pangan tidak bisa dipisahkan dari persoalan kelangkaan (*scarcity*) sumber daya. Kelangkaan sumber daya terletak pada pengelolaan dan keputusan untuk melakukan pertukaran (*tradeoff*), antara efisiensi dan pemerataan. Efisiensi adalah kondisi dalam masyarakat di mana manfaat yang maksimal dapat diperoleh dari penggunaan seluruh sumber daya yang langka. Sedang pemerataan (*equity*) berarti manfaat dari sumber daya tersebut didistribusikan secara adil di antara anggota masyarakat (Mankiw, 2006). Ketahanan pangan mulai menjadi fokus perhatian sejak *World Food Conference: Universal Declaration on the Eradication of Hunger and Malnutrition* pada tahun 1991 hingga sekarang. Dalam perjalanan konsep ketahanan pangan ikut berubah sesuai dengan perkembangannya. Hal tersebut dapat dilihat dari perubahan definisinya, dan berikut definisi ketahanan pangan yang telah mengalami perubahan dan saling melengkapi.

Tabel.1. Indikator Ketahanan Pangan

Subsistem	Indikator	Standar Ideal
Ketersediaan pangan	Ketersediaan energi perkapita	Ketersediaan energi perkapita minimal 2.2 00 Kilokalori/hari
	Ketersediaan protein perkapita	Ketersediaan protein perkapita minimal 57 gram/hari
	Cadangan pangan	Jumlah cadangan pangan minimal 20 persen dari kebutuhan
Akses pangan	Stabilitas Harga pangan	Stabilitas harga pangan dengan perbedaan maksimum 10-25 persen antara waktu normal dan tidak normal
	Akses terhadap sistem informasi dan kewaspadaan pangan	Adanya sistem informasi harga pangan Sistem kewaspadaan pangan dan gizi berkembang sampai desa
	Pengeluaran untuk pangan	Persen pengeluaran pangan < 80 % pendapatan
	Akses terhadap transportasi	Tersedia angkutan umum
Penyerapan pangan	Kecukupan energi per kapita/hari	Angka kecukupan energi minimal 2.000 kkal/hari
	Kecukupan protein per kapita/hari	Angka kecukupan minimal 52 gram/hari
	Kecukupan gizi mikro	Kecukupan zat besi, yodium, dll
	Penganekaragaman pangan	Pola pangan harapan dengan skor PPH 100
	Penurunan kasus keracunan pangan	Jumlah kasus pelanggaran produk pangan 0 persen
Status gizi (nutritional status)	Tingkat kerawanan masyarakat (<70 % AKG)	Persen kelaparan < 2.5 persen
	Balita gizi kurang dan buruk	Persen balita gizi kurang dan buruk < 2.5 persen

Sumber: disarikan dari berbagai sumber.

Situasi Pangan Nasional

Indonesia sebagai negara agraris mengalami masalah ketahanan pangan, yang menurut Yustika (dalam Jokolelono, 2011:89) hal itu terkait dengan masalah pembangunan pedesaan dan sektor pertanian. Pada titik inilah dijumpai realitas bahwa kelembagaan di pedesaan setidaknya dipangku oleh tiga pilar, yaitu kelembagaan penguasaan tanah, kelembagaan hubungan kerja, dan kelembagaan perkreditan. Tanah atau lahan masih merupakan aset terpenting bagi penduduk pedesaan untuk menggerakkan kegiatan produksi. Sedangkan relasi kerja akan menentukan proporsi nisbah ekonomi yang akan dibagi kepada pelaku ekonomi di pedesaan. Terakhir, aspek perkreditan pembiayaan berperan amat penting sebagai pemicu kegiatan ekonomi pedesaan. Ketiga pilar atau kelembagaan tersebut (atau) perubahannya akan amat menentukan keputusan petani sehingga turut mempengaruhi derajat ketahanan pangan.

1. Ketersediaan pangan. Negara berkewajiban untuk menjamin ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup (selain terjamin mutunya) bagi setiap warga negara, karena pada dasarnya setiap warga negara berhak atas pangan bagi keberlangsungan hidupnya. Penyediaan pangan

oleh negara harus diupayakan melalui produksi pangan dalam negeri, dimana produksi ini harus senantiasa meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan penambahan penduduk. Sebagai penyedia bahan pangan, perjalanan sektor pertanian di Indonesia semenjak 1967 sampai sekarang, secara umum mengalami lima fase: fase konsolidasi, fase tumbuh tinggi, fase dekonstruksi, fase krisis, fase transisi dan desentralisasi (Arifin, 2004). Kinerja ekonomi pertanian selama kurun waktu tersebut, menunjukkan pertumbuhan tanaman pangan yang terus menurun setelah tahun 1986. Ini berarti ketersediaan pangan secara otomatis juga mengalami tren yang menurun. Secara umum dapat dikatakan bahwa krisis pangan dunia juga dialami oleh Indonesia, karena sebagai negara agraris Indonesia tidak mampu menyediakan beras untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya, dan sisanya harus diimpor dari negara lain. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan ketersediaan beras sebesar 3 persen pada beras impor, memperlihatkan ketahanan pangan dalam negeri tergolong rawan dan tidak cukup. Lebih mengkhawatirkan lagi adalah beras ini ditentukan oleh negara lain, diantaranya dari Thailand yang dengan berbagai persoalan dalam negerinya membatasi ekspor beras (Jokolelono, 2011:89).

2. Kemandirian Pangan. Kemandirian suatu negara dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya merupakan indikator penting yang harus diperhatikan, karena negara yang berdaulat penuh adalah yang tidak tergantung (dalam bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sebagainya) pada negara lain. Ketergantungan suatu negara dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya dapat berbentuk ketergantungan dalam pasokan, pengambilan keputusan, teknologi, pola konsumsi, dan gaya hidup. Indonesia dengan penduduk lebih dari 210 juta orang, menjadi sangat berbahaya apabila tidak mandiri dalam pangan. Namun perlu dicatat bahwa kemandirian pangan, tidak berarti menolak ekspor-impor pangan, karena perdagangan internasional yang menguntungkan dapat digunakan untuk mensejahterakan rakyat. Kemandirian pangan dilihat dari rata-rata pangsa produksi terhadap konsumsi domestik, menunjukkan bahwa sebenarnya peningkatan produksi pangan di Indonesia tidak mampu memenuhi permintaan yang terus meningkat dan bervariasi. Berdasar data neraca bahan pangan FAO tahun 2003, rasio produksi domestik terhadap konsumsi bahan pangan Indonesia tahun 1970-2001 dicukupi dengan impor (Arifin, 2004:48). Situasi ini terus berlanjut sampai sekarang.

Situasi Petani

Banyak pemikiran, konsep, dan program yang ditujukan untuk pembangunan pedesaan dalam semua aspek. Perhatian banyak diberikan pada pembangunan komunitas atau *community*

development (Summer, 1986), penguatan kelembagaan sosial dan ekonomi (Hanson, *et al.*, 2010), pembiayaan seperti kredit mikro (Gaisina, 2011), perluasan pasar (Goyal, 2010), dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Xiang & Sumelius, 2010). Semua pendekatan ini menempatkan masyarakat pedesaan sebagai obyek pembangunan karena orientasi ekonomi berbasis pada produksi atau jasa primer. Akibatnya, kemajuan yang diperoleh hanya terbatas pada nilai dasar yang terkandung dalam komoditas, produk primer atau jasa pokok dari masyarakat pedesaan. Keuntungan terbesar dibentuk dan diperoleh di sektor hilir yang umumnya berlokasi di perkotaan. Ekonomi pedesaan bertumpu pada pertanian dengan struktur yang sangat rapuh atau sumberdaya lainnya pada eksploitasi primer. Kondisi seperti itu tidak akan mampu menopang perekonomian secara memadai. Dengan kata lain, pertanian dan sumberdaya primer lainnya tidak akan pernah mensejahterakan masyarakat desa secara luas dan merata. Struktur subsisten memang tidak diharapkan sebagai tumpuan ekonomi untuk meningkatkan derajat petani, tetapi sekedar bertahan hidup dalam banyak keterbatasan (Thompson & Ward, 2005). Kesejahteraan petani pangan yang relatif rendah dan menurun saat ini akan sangat menentukan prospek ketahanan pangan nasional. Kesejahteraan tersebut ditentukan oleh berbagai faktor dan keterbatasan, diantaranya yang utama adalah:

1. Sebagian petani miskin karena memang tidak memiliki faktor produktif apapun kecuali tenaga kerjanya (*they are poor because they are poor*). Dalam hal ini, keterbatasan sumber daya manusia yang ada (rendahnya kualitas pendidikan yang dimiliki petani pada umumnya) menjadi masalah yang cukup rumit, disisi lain kemiskinan struktural menjadikan akses petani terhadap pendidikan sangat minim. Kemiskinan petani pedesaan barangkali dapat juga dijelaskan melalui *capability approach* yang diketengahkan oleh Sen (1999) di dalam *Development as Freedom*. Menurut Sen, kemiskinan berkaitan dengan *freedom of choice*; orang miskin sama sekali tidak memiliki *freedom of choice* karena terjadi *capability deprivation*. *Capability* mengacu pada dua perkara, yaitu *ability to do* dan *ability to be*. Petani miskin di pedesaan benar-benar mengalami *ability to do* dan *ability to be* yang rendah karena mereka dalam posisi yang dirampas. Berbagai macam *deprivation* dapat diketengahkan di sini:
 - a. *Structural deprivation*. Struktur berkaitan dengan: (1) *power relations*, dimana posisi petani selalu dalam posisi yang lemah; (2) adanya kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan; (3) dualisme ekonomi yang muncul dalam wajah baru.
 - b. *Social capability deprivation*: orang miskin tidak dapat meraih kesempatan, informasi, pengetahuan, ketrampilan, dan partisipasi dalam organisasi.

- c. *Economic capability deprivation*: orang miskin tidak dapat mengakses fasilitas keuangan pada lembaga-lembaga keuangan resmi seperti perbankan, tetapi mereka terjebak pada bank plecit dan kaum rentenir yang tidak membutuhkan prosedur yang berbelit-belit.
 - d. *Technological capability deprivation*: dimana orang miskin tidak dapat memiliki teknologi baru yang memerlukan modal yang cukup besar. Teknologi tradisional seperti pembuatan alat-alat dari bahan lokal (tanah, bambu, kayu, dll) telah digantikan oleh alat-alat pabrikan.
 - e. *Political capability deprivation*: petani miskin di pedesaan tidak mampu mempengaruhi keputusan politik yang dirumuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tidak didengarkan aspirasinya, tidak memiliki kemampuan untuk melakukan *collective action*.
 - f. *Psychological deprivation*: petani miskin pedesaan selalu memperoleh stigma sebagai orang-orang yang kolot, bodoh, malas, tidak aspiratif. Stigma inilah yang berakibat mereka menjadi rendah diri dan merasa disepelekan, merasa teralienasi di dalam kehidupan sosial dan politik.
2. Luas lahan petani sempit dan mendapat tekanan untuk terus terkonversi. Pada umumnya petani di Indonesia rata-rata hanya memiliki tanah kurang dari 1/3 hektar. Jika dilihat dari sisi produksi tentu saja dengan luas tanah semacam ini tidak dapat digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari bagi petani (Adiwibowo, 2008). Masyarakat desa dibedakan menjadi tiga lapisan, yaitu: (1) Kelompok buruh tani, yaitu kelompok masyarakat desa yang mengalami kesulitan ekonomi sehingga mendorong mereka untuk melakukan urbanisasi, (2) *Peasant*, yaitu petani-petani kecil yang mengalami kesulitan dalam menghadapi petani-petani kaya, (3) *Farmers*, yaitu petani-petani kaya yang lebih mempunyai kecenderungan untuk menanam kembali modalnya di dalam kegiatan usaha tani (Apriantono, 2007).
 3. Terbatasnya akses terhadap dukungan pelayanan pembiayaan dan ketersediaan modal perlu mendapatkan perhatian lebih oleh pemerintah. Pada umumnya permasalahan yang paling mendasar yang dialami oleh petani adalah keterbatasan modal dalam penyediaan pupuk atau benih. Akses petani terhadap sumber-sumber modal yang resmi masih sangat terbatas, meski berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan bantuan modal. Namun upaya itu tidak sepenuhnya dapat mengatasi kesulitan modal bagi petani. Misalnya pada lembaga perbankan. Terbatasnya akses ini dapat dilihat dari rumitnya persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan kredit, tingginya suku bunga, informasi yang masih sukar dijangkau, panjangnya birokrasi, kurangnya penyuluhan dari pemerintah serta persyaratan agunan yang dinilai memberatkan petani. Hal ini berdampak pada lemahnya posisi tawar para petani dan pembangunan di bidang pertanian semakin sulit untuk diwujudkan. Akibatnya, petani banyak

yang terlilit utang dengan tengkulak (rentenir). Hal ini dapat dilihat dari hasil panen petani harus rela dibagi dengan pihak lain. Terkadang hasil panen yang didapat lebih dari setengahnya mesti dibayarkan pada pemilik modal (tengkulak). Semua kebutuhan penanaman disuplai oleh pemilik modal sehingga ketika panen keuntungan yang diperoleh petani menjadi tidak sepadan dengan pengorbanannya. Dalam penyediaan pupuk dan penjualan hasil panen banyak diatur oleh tengkulak sehingga pendapatan petani tetap kecil. Sebenarnya petani sadar pinjaman yang dilakukan pada tengkulak (rentenir) merugikan, namun karena keadaan terdesak, petani banyak yang gelap mata dengan melakukan pinjaman guna memenuhi biaya penanaman pada pihak manapun.

4. Penggunaan teknologi pertanian seharusnya bertujuan untuk meningkatkan hasil dan memenuhi kebutuhan pangan. Namun tidak ada atau terbatasnya akses terhadap informasi dan teknologi yang lebih baik sehingga petani di Indonesia kebanyakan masih mengolah tanah dengan cara tradisional. Hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan petani yang rendah dan keterampilan petani dalam pengelolaan pertanian yang juga rendah. Pendidikan merupakan komponen penting dan vital terhadap pembangunan terutama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang keduanya merupakan input bagi total produksi. Untuk itu perlu kiranya pengetahuan, pendidikan, dan keterampilan petani ditingkatkan dalam mengolah. (<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/7268/1/09E01816>). Pendidikan juga berfungsi meningkatkan produktivitas. Selain dari itu kemampuan untuk menyerap teknologi memerlukan peningkatan kualitas sumber manusia (Sirojuzilam, 2008). Tingkat pendidikan (formal maupun non formal) besar sekali pengaruhnya terhadap penyerapan ide-ide baru, sebab pengaruh pendidikan terhadap seseorang akan memberikan suatu wawasan yang luas, sehingga petani tidak mempunyai sifat yang tidak terlalu tradisional. Jadi tingkat pendidikan masyarakat merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi pola pikir seseorang dalam menentukan keputusan menerima inovasi baru, karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang diharapkan dapat berpikir lebih baik dan mudah menyerap inovasi pertanian yang berkaitan dengan pengembangan usahatannya. Mereka yang berpendidikan tinggi relatif lebih cepat dalam melaksanakan adopsi inovasi. Begitu pula sebaliknya mereka yang berpendidikan rendah, agak sulit dan memakan waktu yang relatif lama untuk mengadakan perubahan (Soedjatmiko, 1990).
5. Struktur pasar yang tidak adil dan eksploitatif akibat posisi rebut-tawar (*bargaining position*) yang sangat lemah. Untuk itu, perlulah penguatan-penguatan di tingkat petani untuk meningkatkan posisi tawar tersebut. Diantaranya adalah penguatan kelembagaan petani.

Kelembagaan merupakan keseluruhan pola-pola ideal, organisasi, dan aktivitas yang berpusat di sekeliling kebutuhan dasar. Suatu kelembagaan pertanian dibentuk selalu bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan petani sehingga lembaga mempunyai fungsi. Kelembagaan petani dibentuk pada dasarnya mempunyai beberapa peran, yaitu: (a) tugas dalam organisasi (*inter-organizational tasks*) untuk memediasi masyarakat dan negara, (b) tugas sumberdaya (*resource tasks*) mencakup mobilisasi sumberdaya lokal (tenaga kerja, modal, material, informasi) dan pengelolaannya dalam pencapaian tujuan masyarakat, (c) tugas pelayanan (*service tasks*) mungkin mencakup permintaan pelayanan yang menggambarkan tujuan pembangunan atau koordinasi permintaan masyarakat lokal, dan (d) tugas antar organisasi (*extra-organizational tasks*) memerlukan adanya permintaan lokal terhadap birokrasi atau organisasi luar masyarakat terhadap campur tangan oleh agen-agen luar (Esman & Uphoff dalam Garkovich, 1989).

Menurut Akhmad (2007), upaya yang harus dilakukan petani untuk menaikkan posisi tawar petani adalah dengan:

1. Konsolidasi petani dalam satu wadah untuk menyatukan gerak ekonomi dalam setiap rantai pertanian, dari pra produksi sampai pemasaran. Konsolidasi tersebut pertama dilakukan dengan kolektifikasi semua proses dalam rantai pertanian, meliputi kolektifikasi modal, kolektifikasi produksi, dan kolektifikasi pemasaran. Kolektifikasi modal adalah upaya membangun modal secara kolektif dan swadaya, misalnya dengan gerakan simpan-pinjam produktif yang mewajibkan anggotanya menyimpan tabungan dan meminjamnya sebagai modal produksi, bukan kebutuhan konsumtif. Hal ini dilakukan agar pemenuhan modal kerja pada awal masa tanam dapat dipenuhi sendiri, dan mengurangi ketergantungan kredit serta jeratan utang tengkulak.
2. Kolektifikasi produksi, yaitu perencanaan produksi secara kolektif untuk menentukan pola, jenis, kuantitas dan siklus produksi secara kolektif. Hal ini perlu dilakukan agar dapat dicapai efisiensi produksi dengan skala produksi yang besar dari banyak produsen. Efisiensi dapat dicapai karena dengan skala yang lebih besar dan terkoordinasi dapat dilakukan penghematan biaya dalam pemenuhan faktor produksi, dan kemudahan dalam pengelolaan produksi, misalnya dalam penanganan hama dan penyakit. Langkah ini juga dapat menghindari kompetisi yang tidak sehat di antara produsen yang justru akan merugikan, misalnya dalam irigasi dan jadwal tanam.
3. Kolektifikasi dalam pemasaran produk pertanian. Hal ini dilakukan untuk mencapai efisiensi biaya pemasaran dengan skala kuantitas yang besar, dan menaikkan posisi tawar produsen

dalam perdagangan produk pertanian. Kolektifikasi pemasaran dilakukan untuk mengikis jaring-jaring tengkulak yang dalam menekan posisi tawar petani dalam penentuan harga secara individual. Upaya kolektifikasi tersebut tidak berarti menghapus peran dan posisi pedagang distributor dalam rantai pemasaran, namun tujuan utamanya adalah merubah pola relasi yang merugikan petani produsen dan membuat pola distribusi lebih efisien dengan pemangkasan rantai tata niaga yang tidak menguntungkan.

B. MEMBANGUN KETAHANAN PANGAN PETANI

Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) mendefinisikan ketahanan pangan sebagai suatu kondisi di mana setiap orang di setiap waktu dapat memperoleh pangan, baik untuk menyangga kegiatan maupun untuk mengembangkan kehidupan sehat. Ketahanan pangan (*food security*) secara luas dapat juga diartikan sebagai terjaminnya akses pangan untuk segenap rumah tangga serta individu setiap waktu sehingga mereka bisa bekerja dan hidup sehat (Maksum, 2009). Dalam operasionalnya ketahanan pangan terkait dengan 3 aspek penting yang saling berelasi satu sama lain, yaitu ketersediaan pangan (*food availability*), keterjangkauan pangan (*food accessibility*), dan keterjaminan/kepastian mendapatkan pangan (*food stability*).

Terwujudnya ketahanan pangan dihasilkan oleh bekerjanya suatu sistem dan unsur-unsur yang merupakan subsistem yang saling berinteraksi, yaitu subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi. Pembangunan ketahanan pangan memerlukan harmonisasi dari pembangunan ketiga subsistem tersebut. pembangunan subsistem ketersediaan mencakup pengaturan kestabilan dan kesinambungan penyediaan pangan baik yang berasal dari produksi dalam negeri, cadangan, maupun dari impor. Pembangunan subsistem distribusi mencakup aksesibilitas pangan antar wilayah dan antar waktu, serta stabilitas harga pangan strategis. Pembangunan subsistem konsumsi mencakup jumlah, mutu gizi/nutrisi, keamanan, dan keragaman konsumsi pangan (Badan Bimas Ketahanan Pangan, 2001: 53).

Agar tujuan yang hendak dicapai terwujud, ada beberapa usaha perbaikan yang dilakukan untuk membangun ketahanan pangan petani antara lain:

1. Revitalisasi Pertanian

Revitalisasi pertanian merupakan suatu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, karena selama ini petani hanya dianggap sebagai alat produksi dan pelengkap dalam pelaksanaan pembangunan. Revitalisasi sektor pertanian dan pedesaan yang sejalan dengan upaya pengentasan kemiskinan merupakan salah satu dari tiga strategi yang

digunakan untuk operasionalisasi konsep pembangunan. Konsep revitalisasi pertanian mengandung arti keinginan atau upaya untuk menempatkan kembali sektor pertanian sebagai sektor penting dalam pembangunan baik secara proporsional maupun kontekstual. Hal ini dimaksudkan untuk menyegarkan kembali vitalitas serta memberdayakan kemampuan serta kinerja pertanian dalam pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sektor lain. Berupaya untuk membangun pertanian secara lebih partisipatif, sehingga diharapkan tumbuh komitmen dan kerjasama seluruh stakeholder serta perubahan paradigma berpikir masyarakat dalam melihat pertanian.

Bertani bukan hanya sekedar urusan bercocok tanam, tetapi mempunyai multifungsi dan merupakan *way of life* serta sumber kehidupan sebagian besar masyarakat. Permasalahan yang dihadapi oleh program revitalisasi pertanian adalah sebagai berikut:

- a. Lemahnya dasar penentuan target revitalisasi pertanian. Lemahnya dasar yang digunakan dalam penetapan target, antara satu target dan lainnya terkadang tidak saling mendukung. Jumlah lahan pertanian sekarang ini tidak sesuai dengan jumlah tenaga kerja yang ada di bidang pertanian sehingga beban atau tekanan terhadap lahan sangat berat.
- b. Kondisi lahan yang ada saat ini. Lahan pertanian yang ada sekarang ini banyak mengalami konversi atau alih fungsi. Banyak lahan terlantar yang tidak diusahakan secara optimal sesuai dengan potensinya sehingga terbatasnya lahan yang dapat diusahakan untuk usaha tani tidak saja mempersempit rata-rata luas penguasaan oleh petani tetapi juga makin menekan tingkat upah di pedesaan.

2. Reforma Agraria

Reforma agraria ialah suatu penataan ulang atau restrukturisasi pemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria, terutama tanah untuk kepentingan petani, buruh tani, dan rakyat kecil pada umumnya yang sekaligus menjadi landasan menuju proses industrialisasi nasional. Intinya adalah *land reform* dalam pengertian redistribusi pemilikan dan penguasaan tanah. Tanah harus didistribusi kepada petani, khususnya petani miskin (dengan kepemilikan tanah kurang dari 0.5 ha) dan buruh tani atau petani tak bertanah (*landless*). Pembaruan agraria yang kita maksud tidak hanya menyangkut *land reform* bagi kaum tani dan sebagai dasar pengembangan sektor pertanian semata, melainkan juga menyentuh upaya untuk menata ulang sistem penguasaan dan pengelolaan atas seluruh kekayaan alam secara mendasar dengan prinsip keadilan agraria (Khudori, 2007). Pada tahap awal, program redistribusi tanah harus diikuti dengan dukungan modal produksi (kredit usaha). Perbaikan di dalam distribusi barang-barang yang diperlukan sebagai input

pertanian, perbaikan di dalam sistem pemasaran, dan perdagangan hasil-hasil pertanian, penyuluhan-penyuluhan pertanian yang diperlukan untuk membantu para petani memecahkan masalah-masalah teknis yang dihadapinya, dan program lainnya yang pada intinya dapat menunjang keberhasilan para petani penerima tanah dalam memproduksi.

3. Sumberdaya

Pembangunan institusi menempatkan manusia sebagai sumberdaya yang paling utama. Pembangunan yang dilakukan hendaknya harus mampu meningkatkan kualitas sumberdaya manusianya (*human capital*). Dengan kualitas sumberdaya yang tinggi akan mampu mengolah sumberdaya alam dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan. Sumber daya manusia yang dimiliki di Indonesia sangat banyak, tetapi sayangnya tidak memiliki kualitas yang baik. Pembinaan sumber daya manusia pertanian hendaknya diarahkan tidak saja pada kemampuannya dalam berusaha tani, tetapi juga pada kemampuan dalam bisnis pertanian. Pengembangan sumber daya manusia pertanian dicapai melalui peningkatan daya nalar dan produktivitas kerja.

Peningkatan kualitas daya nalar dan produktivitas kerja dilakukan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian yang antara lain dilaksanakan melalui peningkatan efektivitas pendidikan, dan pelatihan, termasuk di dalamnya penyesuaian orientasi program pendidikan, pelatihan dan penyuluhan pertanian. Tentunya hal ini harus mengacu pada peningkatan kemampuan untuk melaksanakan pembangunan dengan sistem agrikultur, mengembangkan keterpaduan antar subsistem dan meningkatkan kemampuan perencanaan dan monitoring. Orientasi program pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan pertanian juga perlu disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi dan budaya setempat, potensi sumber daya pertanian, dan potensi pengembangan wilayah pedesaan.

Petani, sebagai subyek pembangunan pertanian, di satu sisi juga harus mampu menciptakan generasi penerus yang mencintai pekerjaan sebagai petani. Perlunya pewarisan nilai-nilai budaya yang mencerminkan bahwa pekerjaan sebagai petani adalah pekerjaan mulia, sama halnya seperti pekerjaan-pekerjaan lainnya. Penguatan nilai-nilai budaya ini tentunya akan berusaha mengimbangi budaya materialisme yang mengguncang dunia remaja saat ini. Jika diperhatikan dengan teliti, saat ini jarang sekali dijumpai petani yang berusia muda. Kebanyakan yang menjadi petani adalah mereka-mereka yang sudah tua. Para pemuda, lebih tertarik bekerja di bidang lain terutama jasa. Bila akhirnya mereka bekerja menjadi petani, ini adalah pilihan terakhir karena gagal memperoleh pekerjaan di bidang lain. Bahkan, beberapa perguruan tinggi yang memiliki lulusan

dari Fakultas Pertanian lebih tertarik untuk bekerja di bidang lain daripada bekerja di sektor pertanian yang jelas-jelas merupakan keahliannya.

Sumberdaya yang penting dilihat dalam tulisan ini adalah yang berkenaan dengan tanah (lahan) dan air (pengairan). Peningkatan jumlah penduduk di pedesaan yang berbasis pertanian telah diketahui menyebabkan eksploitasi yang berlebihan terhadap sumberdaya alam dan menyebabkan terjadinya fragmentasi lahan. Banyak penelitian yang dilakukan mencatat bahwa wilayah padat penduduk di dataran rendah mengalami tekanan terhadap lahan yang tinggi dan memunculkan gejala perambahan atau ekspansi penduduk ke wilayah pegunungan sekitarnya. Pengaruh aspek kependudukan terhadap pengelolaan sumberdaya pedesaan dapat menjadi faktor penekan maupun juga sebagai faktor pendorong perkembangan ekonomi pedesaan. Dalam hal ini adalah berkurangnya lahan pertanian, terjadinya konversi lahan pertanian, dan semakin kreatifnya masyarakat desa untuk membuka usaha-usaha lain dari pertanian maupun luar pertanian sebagai penambah perekonomiannya (Baiquni, 2008; 67-68).

Permasalahan lahan ini juga berimbas terhadap masalah pengairan bagi pertanian. Perusakan hutan dan terjadinya privatisasi air menyebabkan petani sangat mengeluhkan tentang pengairan. Khusus di daerah pertanian yang kekurangan air, seringkali terjadi konflik antar petani sendiri dalam pengelolaan air. Kondisi ini, tidak banyak mendapat perhatian yang intens dari pemerintah, mengingat kebijakan yang diprioritaskan oleh pemerintah saat ini adalah bidang industri. Ini dapat dilihat dari beberapa kebijakan yang sangat menguntungkan pada perusahaan pemilik HPH (Hak Pengelolaan Hutan) dan perusahaan air minum kemasan. Khusus dengan pengusaha air minum kemasan, pemerintah dapat langsung bekerjasama dan menandatangani kontrak penguasaan air tersebut. Tentu saja, hal ini sangat merugikan bagi pertanian dan petani.

4. Membangun Kelembagaan Tani yang Kuat

Pembangunan pertanian dengan pengembangan kelembagaan pertanian amat diperlukan. Penulis dalam hal ini membedakan antara kelembagaan (institutional) dengan organisasi. Kelembagaan adalah suatu aturan yang dikenal, diikuti dan ditegakkan secara baik oleh anggota masyarakat, yang memberi naungan (*liberty*) dan hambatan (*constraints*) bagi individu atau anggota masyarakat. Kelembagaan kadang ditulis secara formal dan ditegakkan oleh aparat pemerintah, tetapi juga dapat tidak tertulis secara internal seperti pada aturan adat dan norma yang dianut masyarakat. Kelembagaan itu umumnya dapat diprediksi (*predictable*) dan cukup stabil serta dapat diaplikasikan pada situasi berulang. Kelembagaan memberi nafas dan ruang gerak bagi tumbuh dan berkembangnya suatu organisasi (Arifin, 2004; 233). Pengembangan kelembagaan

adalah salah satu langkah penting dalam perbaikan distribusi sumber daya dan peningkatan keadilan sosial. Dalam literatur ekonomi kelembagaan, definisi kelembagaan mencakup dua demarkasi penting, yakni konvensi (*conventions*) dan aturan main (*rules of the game*). Kelembagaan diartikan sebagai seperangkat aturan main atau tata cara untuk kelangsungan sekumpulan kepentingan (*a set of working rules of going concerns*). Jadi, kelembagaan itu adalah kegiatan kolektif dalam suatu kontrol atau yurisdiksi, pembebasan atau liberalisasi, dan perluasan atau ekspansi kegiatan individu.

Kelembagaan sangat menentukan ‘bagaimana seseorang atau sekelompok orang harus atau tidak harus mengerjakan sesuatu (bertindak), apakah karena hak atau memang kewajibannya, bagaimana mereka boleh mengerjakan sesuatu tanpa intervensi dari orang lain (kebolehan atau *liberty*), bagaimana mereka dapat (mampu) mengerjakan sesuatu dengan bantuan kekuatan kolektif (kemampuan atau hak), dan bagaimana mereka tidak dapat memperoleh kekuatan kolektif untuk mengerjakan sesuatu atas namanya (ketidakmampuan atau *exposure*). Oleh karena itu, kelembagaan adalah serangkaian hubungan keteraturan (*ordered relationships*) antar beberapa orang yang menentukan hak, kewajiban atau tepatnya kewajiban menghargai hak orang lain, privilis, dan tanggung jawab mereka dalam masyarakat atau kelembagaan tersebut (Bromley dalam Cernia, 1989).

Konteks pembangunan kelembagaan, terutama pembangunan pertanian di pada masyarakat pedesaan adalah mencoba menghidupkan nilai-nilai sosial dan budaya yang telah hilang akibat masuknya program revolusi hijau yang dilaksanakan pemerintah. Penulis melihat bahwa inti dari kelembagaan pertanian telah menghilang yang sifatnya sebagai konvensi (*conventions*), seperti budaya penghormatan kepada Dewi kesuburan, pertanian yang berwawasan lingkungan yang berkelanjutan dengan pemakaian teknologi pertanian yang sangat berlebihan, sistem penguasaan lahan, lumbung padi, model *sakap* dan *bawon* serta banyak hal lainnya. Untungnya, kelembagaan lain yang mendukung sektor pertanian di pedesaan tidak hilang secara keseluruhan, sehingga tetap dapat mendukung kehidupan pertanian di pedesaan, seperti budaya gotong royong, siskamling, arisan, dan lainnya.

Memudarnya kelembagaan di pedesaan ini disebabkan oleh adanya upaya paksa dari pemerintah sebagai otoritas penguasa dalam menjalankan programnya, terutama yang berhubungan dengan produksi pangan. Masyarakat desa, khususnya petani harus mampu menghasilkan produksi pertaniannya semakin meningkat dengan menggunakan produk-produk industri dan teknologi. Secara tidak sadar, pemaksaan produk industri dan teknologi pertanian tersebut mulai menghilangkan nilai-nilai budaya yang sudah dimiliki masyarakat. Salah satunya

yang paling nyata adalah lumbung padi. Lumbung padi yang semula berfungsi sebagai persediaan makanan dan stabilitas harga, sudah jarang sekali dijumpai karena hasil panen masyarakat sudah langsung dijual ke Bulog. Kalaupun masih ada, akan disimpan di rumah sendiri. Dalam hal ini peran lumbung padi telah digantikan oleh Bulog. Namun, peran yang dijalankannya sangat merugikan petani.

5. Model Pertanian yang Berkelanjutan

Terminologi pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*) sebagai padanan istilah agro-ekosistem pertama kali dipakai sekitar awal tahun 1980-an oleh para pakar pertanian FAO (*Food Agriculture Organization*). Agro-ekosistem sendiri mengacu pada modifikasi ekosistem alamiah dengan sentuhan campur-tangan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, serat, dan kayu untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia. Conway (1990:42) menggunakan istilah pertanian berkelanjutan dengan konteks agro-ekosistem yang berupaya memadukan antara produktivitas (*productivity*), stabilitas (*stability*), dan pemerataan (*equity*). Ia menjelaskan bahwa konsep agro-ekosistem atau pertanian berkelanjutan adalah jawaban bagi kegamangan dampak *green revolution* yang antara lain ditengarai oleh semakin merosotnya produktivitas (*leveling off*).

Pertanian organik menghimpun seluruh imajinasi petani dan konsumen yang secara serius dan bertanggungjawab menghindarkan bahan kimia dan pupuk yang bersifat meracuni lingkungan dengan tujuan untuk memperoleh kondisi lingkungan yang sehat. Mereka juga berusaha untuk menghasilkan produksi tanaman yang berkelanjutan dengan cara memperbaiki kesuburan tanah dengan menggunakan sumber daya alami seperti mendaur ulang limbah pertanian. Dengan demikian, pertanian organik merupakan suatu gerakan “kembali ke alam” (Sutanto, 2002: 19). Pertanian organik diartikan sebagai adanya campur tangan manusia yang lebih intensif untuk memanfaatkan lahan dan berusaha meningkatkan hasil berdasarkan prinsip daur-ulang yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi setempat.

Salikhin (2003: 1) menjelaskan bahwa pada hakikatnya sistem pertanian yang berkelanjutan adalah *back to nature*, yakni sistem pertanian yang tidak merusak, tidak mengubah, serasi, selaras, dan seimbang dengan lingkungan atau pertanian yang patuh dan tunduk kepada kaidah-kaidah alamiah. Upaya manusia yang mencoba mengingkari kaidah-kaidah ekosistem dalam jangka pendek mungkin mampu memacu produktivitas lahan dan hasil (revolusi hijau). Namun, dalam jangka waktu yang panjang biasanya hanya akan berakhir dengan terjadinya kehancuran lingkungan.

Pada hakikatnya, eksistensi konsep pertanian berkelanjutan bukan sesuatu yang baru. King (dalam Zamora, 1995: 14) menuliskan bahwa teknik usaha tani dengan metode organik atau pertanian permanen (*organic farming*) yang mengintegrasikan pengelolaan kesuburan tanah dengan sistem ekologi telah dilakukan oleh para petani China, Jepang, dan Korea Selatan sekitar empat abad yang lalu. Dengan demikian, isu paradigma pertanian yang berkembang sekarang ini sebenarnya merupakan kebangkitan kembali untuk mencari model pengelolaan pertanian yang lestari. Kegagalan pertanian modern memaksa para pakar pertanian dan lingkungan bekerja keras dan mencoba merumuskan kembali sistem pertanian organik yang ramah lingkungan (*back to nature*).

Merujuk pada teori siklus sosial, setiap entitas sosial (misalnya masyarakat manusia, organisasi, dan bangsa-bangsa) akan menjalani keberadaannya di dunia menurut suatu pola tetap yang berulang dengan interval waktu yang relatif tetap. Pola perulangan tersebut mirip dengan teori *product life cycle* dalam ilmu pemasaran ekonomi. Dalam sistem kebudayaan Jawa juga terdapat sebuah keyakinan adanya siklus nasib seseorang (kelompok masyarakat) sepanjang kehidupannya, yang dikenal dengan istilah *cakra manggilingan*. Satu siklus terbagi dalam empat era (masa), yaitu era bangkit atau lahir, era tumbuh, era dewasa, dan era uzur (Salikhin, 2003: 4).

Memasuki abad 21, kesadaran akan pertanian yang ramah lingkungan semakin meningkat, sejalan dengan tuntutan era globalisasi dan perdagangan bebas dunia. Hal ini, terutama sekali sangat dirasakan oleh negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Negara-negara maju tersebut, berdasarkan kesadaran masyarakatnya untuk mengonsumsi makanan sehat, membentuk asosiasi pergerakan petani organik yang disebut dengan IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) untuk melakukan pemberdayaan dan sertifikasi bagi produk-produk pertanian organik. IFOAM sudah beranggotakan 80 organisasi yang tersebar di 30 negara (Goering, 1993: 11).

Sistem pertanian berkelanjutan berisi tentang ajakan moral untuk berbuat kebajikan pada lingkungan sumber daya alam dengan mempertimbangkan tiga matra atau aspek sebagai berikut (Salikhin, 2003: 6-7):

- a. Kesadaran Lingkungan (*Ecologically Sound*). Sistem budi daya pertanian tidak boleh menyimpang dari sistem ekologis yang telah ada di masyarakat. Keseimbangan adalah indikator adanya harmonisasi dari sistem ekologis yang mekanismenya ditentukan oleh hukum alam. Misalnya tidak membunuh ular sawah agar mampu mengendalikan hama tikus atau tidak menggunakan pestisida sebab akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan lingkungan karena terbunuhnya organisme non-hama yang sebenarnya bermanfaat.

- b. Bernilai Ekonomis (*Economic Valuable*). Sistem budidaya pertanian harus mengacu pada pertimbangan untung rugi, bagi diri sendiri atau bagi orang lain, untuk jangka pendek dan jangka panjang, serta bagi organisme dalam sistem ekologi maupun di luar sistem ekologi.
- c. Berwatak Sosial-Kemasyarakatan (*Socially Just*). Sistem pertanian harus selaras dengan norma-norma sosial dan budaya yang dianut dan dijunjung tinggi oleh masyarakat sekitarnya. Masing-masing daerah memiliki kekayaan pengetahuan lokal spesifik (*local genius*) dan tatanan adat di bidang pertanian yang sangat dihormati oleh masyarakat setempat.

Manguiat (1995: 19) menjelaskan secara umum, pertanian berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan (*quality of life*). Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan paling tidak tujuh macam kegiatan, yaitu meningkatkan pembangunan ekonomi, memprioritaskan kecukupan pangan, meningkatkan pengembangan sumber daya manusia, meningkatkan harga diri, memberdayakan dan memerdekakan petani, menjaga stabilitas lingkungan (aman, bersih, seimbang, diperbaharui), dan memfokuskan tujuan produktivitas untuk jangka panjang. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan suatu pendekatan pertanian berkelanjutan yang bersifat proaktif (*pro-active*), berdasarkan pengalaman (*experiential*), dan partisipatif (*participatory*).

C. KESIMPULAN

Penyelesaian yang mendasar dan komprehensif dalam berbagai aspek seperti yang disebutkan di atas, kesejahteraan petani akan selalu terancam dan ketahanan pangan akan sangat sulit dicapai. Maka di sinilah peranan pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah harus dijadikan perhatian utama demi terwujudnya ketahanan pangan karena ketahanan pangan dapat terwujud dengan baik jika pengelolaannya dikelola mulai dari tataran mikro (mulai dari rumah tangga). Jika akses masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan pangan sudah baik maka ketahanan pangan di tataran makro sudah pasti secara otomatis akan dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwibowo, S., Melanie, S. A., & Kolopaking, L. M. (2008). *Ranah Kajian Sosiologi Pedesaan 80 Tahun Prof. Dr. Sediono M.P. Tjondronegoro*. Bogor: Penerbit Fakultas Ekologi Manusia IPB.
- Akhmad, S. (2007). *Membangun Gerakan Ekonomi Kolektif dalam Pertanian Berkelanjutan: Perlawanan terhadap Liberalisasi dan Oligopoli Pasar Produk Pertanian*. Purwokerto Jawa Tengah: BABAD.

- Apriantono, A. (2007). Pertanian Organik dan Revitalisasi Pertanian (Pidato pada Workshop dan Kongres II Maporina dengan tema yang cukup menantang yaitu: Menghantarkan Indonesia Menjadi Produsen Organik Terkemuka).
- Arifin, B. (2004). *Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Badan Bimas Ketahanan Pangan (2001). *Rencana Strategis dan Program Kerja Pemantapan Ketahanan Pangan Tahun 2001-2014*. Jakarta: Departemen Pertanian.
- Badan Ketahanan Pangan (2005). *Kebijakan Umum Ketahanan Pangan*.
- Baiquni, M. (2008). Pengelolaan Sumber Daya Pedesaan dalam Konteks Dinamika Lokal dan Perubahan Global (dalam Suharman. 2008. “*Bunga Rampai Pemikiran Pedesaan 2002-2008*”). Seri Warta Pedesaan. Yogyakarta: PSPK UGM.
- Cernea, M. (1989). Modernisasi dan Potensi Pembangunan Organisasi Petani Jelata Tradisional. (dalam Ottir, Mustafa O; Hozner, Burkart; Suda, Znedek. 1989. “*Sosiologi Modernisasi: Telaah Kritis tentang Teori, Riset, dan Realitas*”). Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Conway, G. R., & Barbier, E. B. (1990). *After Green Revolution: Sustainable Agriculture Development*. London: Earthscan Publication.
- Gaisina, S. (2011). Credit through Rural Credit Partnerships for Agricultural Producers in Kazakhstan. *Journal of Rural Cooperation*, 39(2): 114-130.
- Garkovich, L. E. (1989). Local Organizations and Leadership in Community Development dalam “*Community Development in Perspective*”. Editor James A. Christenson & Jerry W. Robinson, Jr. Iowa: Iowa State University Press. Hal. 196-218.
- Goering, P. (1993). *From the Ground Up: Rethinking Industrial, Agriculture*. Biddles Ltd. Guildford and King’s Lynn England.
- Goyal, A. (2010). Information, Direct Access to Farmers, and Rural Market Performance in Central India. *Applied Economics*, 2(3): 22-45.
- Hanson, J. C., Matavulj, M., & Manzuk, G. (2010). Agricultural Cooperatives and Unions of Cooperatives in Bosnia and Herzegovina: Providing Services and Educational Programs for Farmers. *Journal of Rural Cooperation*, 38(1): 3-19.
- Jokolelono, E. (2011). Pangan dan Ketersediaan Pangan. *Jurnal Media Litbang Sulteng*, IV(2): 88-96.
- Khudori (2007). *Petani, Kemiskinan, dan Reforma Agraria*. Jakarta: Kompas.
- Maksum, M. (2009). Ketahanan Pangan Baru: Minimal Standar Pelayanan bagi Kesejahteraan Sosial dalam Seminar Nasional “*Kesejahteraan (Sosial) Minimal*”. 17 Desember 2009. Dies Natalies UGM ke-60. Yogyakarta.

- Manguiat, I. J. (1995). *In Search Alternative Fertilizers for Sustainable Agriculture the Sesbania Option*. Los Banos Philippines: SEAMEO-SEARCA Collage.
- Mankiw, G. N. (2006). *Principles of Economics: Pengantar Ekonomi Mikro*. Edisi 3. Alih bahasa: Chriswan Sungkono. Penerbit: Salemba Empat.
- Salikhin, K. A. (2003). *Sistem Pertanian Berkelanjutan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sen, A. (1999), *Development as Freedom*. New York: A Division of Random House, Inc.
- Sirojuzilam (2008). *Disparitas Ekonomi dan Perencanaan Regional: Ketimpangan Ekonomi Wilayah Barat dan Wilayah Timur Provinsi Sumatera Utara*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Soedjadmiko, A. (1990). Kajian terhadap Teknologi dalam Rangka Program Intensifikasi Kedelai (Suatu Kasus di Kec. Gumuk Mas Jember). *Tesis*. Pasca Sarjana UGM Yogyakarta.
- Summer, G. F. (1986). Rural Community Development. *Ann. Rev. Sociol.* 12: 347-371.
- Sutanto, R. (2002). *Pertanian Organik: Menuju Pertanian Alternatif dan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Xiang, L. Y. & Sumelius, J. (2010). Analysis of the Factors of Farmers' Participation in the Management of Cooperatives in Finland. *Journal of Rural Cooperation*, 38(2): 134-155.
- Zamora, B. O. (1995). *Contextualizing the Indicator for Sustainable Agriculture: Sustainable Agriculture Indicator*. Los Banos Philippines: SEAMEO-SEARCA.